



DOKUMEN IKU TAHUN 2022-2026

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PANGKALPINANG**



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Rasakunda Gang, Delima Siam VI Kecamatan Girimaya Kode Pos :33143

E-mail : dpppakh@pangkalpinangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 050 / 008 / SK/DPPPAKB-III / 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM

PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK

DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PANGKALPINANG

TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PANGKALPINANG

- Menimbang** :
- a. bahwa Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang telah disusun dalam Perubahan Rencana Strategis DPPPAKB Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
14. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 50).

15. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 148);
16. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 144).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : -
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum pada lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PANGKALPINANG,



Drs. AGUSTU AFENDI, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670809 199403 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkajenean
Nomor : 050/008/SP/0999AEB-1/1/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUSAN/FORMULA	SATUAN	TARGET		
					2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Partisipasi Perempuan pada Lembaga Pemerintahan	Persentase Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan	Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintahan) : jumlah pekerja perempuan x 100	%	20	22	24
2.	Menurunnya Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Korban Perempuan yang Mengalami Kekerasan/ Jumlah Penduduk Perempuan x 100	%	0,014	0,013	0,012
3.	Meningkatnya Nilai KLA	Predikat Kota Layak Anak	-	Predikat	701-800 (Nindya)	701-800 (Nindya)	701-800 (Nindya)
4.	Tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang	Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 tahun	-	Rata-Rata Anak per Wanita	2	2	2
5.	Terwujudnya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera	Jumlah Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera/ Jumlah Total Kelurahan x 100	%	100	100	100

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PANGKALPINANANG



Drs. AGUSTU AFENDI, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670809 199403 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang
Nomor : 050/008/Se/DPKPB-B-T/L/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

No.	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUSAN/FORMULA	SATUAN	TARGET		
						2024	2025	2026
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kabupaten/Kota	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Prima Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Penilaian APiP	Nilai	67	69	71
			Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Dengan Metode Survey	Nilai	85	90	95
2.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya Persentase ARG pada belanja langsung	Persentase ARG Organisasi Perangkat Daerah pada APBD	Jumlah belanja ARG pada APBD/Jumlah Total Belanja Pada APBD x 100%	%	2,40	2,43	2,46
3.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Meningkatnya Penerapan PPRG pada Kabupaten/ Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG/ Jumlah Perangkat Daerah x 100%	%	36	40	42
4.	Program Perlindungan Perempuan	Meningkatnya Kualitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	Jumlah Perempuan yang Mengalami Kekerasan / Jumlah Penduduk Perempuan x 100.000	Rasio	14,35	13,46	12,56
5.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Terwujudnya Kota yang Memenuhi Hak-Hak Anak	Persentase Fasilitas Pemerintah dan Fasilitas Kesehatan Ramah Anak Sesuai Standar	Jumlah Perangkat Daerah ramah Anak Sesuai Standar + Jumlah Fasilitas Kesehatan ramah Anak Sesuai Standar + Jumlah SD/MI dan SMP/MTs Ramah Anak Sesuai Standar / Jumlah Seluruh Perangkat Daerah, Fasilitas Kesehatan dan SD/MI dan SMP/MTs di Kota x 100%	%	30	34	38
6.	Program Perlindungan Khusus Anak	Tertaksananya Perlindungan Khusus Anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak	Jumlah anak korban kekerasan / Jumlah Penduduk Anak x 100%	%	0,41	0,39	0,37

7.	Program Pengendalian Penduduk	Tertaksananya Penyediaan Data Keluarga dan KB	Persentase Tersedianya Data Keluarga dan KB di Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang Memiliki Data Keluarga dan KB yang Lengkap dan Up to Date / Jumlah Kelurahan yang Ada x 100%	%	100	100	100
8.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Menurunnya ASFR 15-19 Tahun	Angka Kelahiran (Remaja Perempuan Umur 15-19 Tahun) per 1000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		kelahiran per 1000 WUS	8,23	8,20	8,17
		Meningkatnya Cakupan PKB/ PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	Cakupan PKB/ PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan/ Jumlah PKB dan PLKB x 100	%	100	100	100
		Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence rate (mCPR)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence rate (MCPR)	Jumlah Peserta KB Aktif Modern dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur x 100%	%	78,00	78,20	78,40
		Menurunnya Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	Jumlah PUS yang Tidak Ingin Anak Lagi/ Ingin anak ditunda tetapi Tidak Ber-KB dibagi Jumlah PUS x 100%	%	7,62	7,58	7,54
		Meningkatnya Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Jumlah Anggota Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) + Jumlah Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) + Jumlah Anggota Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB dibagi Jumlah Anggota Kelompok	%	83,72	83,74	83,76
9.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)							

				BKB+Jumlah Anggota Kelompok BKR+Jumlah Anggota Kelompok BKL x 100%				
		Meningkatnya Cakupan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan	Cakupan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan	Jumlah PPKS/Jumlah Kecamatan x100%	%	100	100	100
		Meningkatnya Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja /Mahasiswa	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja /Mahasiswa	PIK-R/M dibagi Jumlah Kelurahan x 100%	%	66,66	69,04	71,42
10.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Tertaksananya Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kelurahan dengan Kinerja Baik	Jumlah Kelurahan dengan Kinerja Baik/ Jumlah Kelurahan yang Ada x 100%	%	100	100	100
11.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Tertaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase LKK Aktif	Jumlah LKK Kelurahan yang Aktif dalam Kegiatan Skala Kota/ Jumlah LKK Kelurahan yang Ada x 100%	%	100	100	100



KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
 KOTA PANGKALPINANG

Drs. AGUSTU AFENDI, M.Si
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19670809 199403 1 004